GENDER BUDGET STATEMENT
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
Berdasarkan PMK No. 104/2010

SKPD : KELUARGA BERENCANA

TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM		KELUARGA BERENCANA
KEGIATAN		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
KODE REKENING		2.08.2.08.01.18.02
ANALISIS SITUASI	1.	Data Pembuka Wawasan Salah satu isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana tertuang dalam RPJMD berhubungan dengan isu di bidang kesehatan masyarakat rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat diakibatkan permasalahan terkait dengan perilaku pola hidup bersih dan sehat masyarakat, sarana dan prasarana serta kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. Kabupaten Pasaman sampai saat ini belum memiliki sarana kesehatan yang bisa dijangkau seluruh lapisa dengan cepat dan tepat. Begitu juga masih kurangnya pelaksanaan promosi dan sosialisasi kesehatan terutama pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Ditilik dari perspektif jumlah penduduk rendahnya perilaku pola hidup sehat dan bersih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas dan pemerataan pelayanan kese masyarakat disebabkan laju perkembangan penduduk yang tidak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemampuan pemerintah untuk menjangkau pemberi dan pemberdayaan masyarakat maupun penyediaan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan lebih rendah dari perkembangan penduduk yang relatif masih tinggi. Oleh kar Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana menjadi salah satu program penting yang terus diupayakan peningkatannya di Kabupaten Pasaman selama tahun 2016 Begitu juga berlanjut pada tahun 2019 ini. Beberapa kesenjangan yang menjolok terlihat pada pembangunan program KKBPK ini adalah keterlibatan pria dalam keikutsertaan progra salah satu upaya pengendalian penduduk adalah masih sangat kecilnya pria yang ikut ber KB yaitu sebesar 2 %. Dengan data perbandingan wanita dan pria ber KB 2 tahun terakhir y Perbandingan jumlah wanita dan pria yang memakai alat kontrasepsi tahun 2018 adalah 29.903 wanita, 2.511 pria. Perbandingan jumlah wanita dan pria yang memakai alat kontrasepsi keadaan Mei 2019 adalah 30.693 wanita, 2.609 pria. Namun demikian beberapa permasalahan pengendalian kualitas penduduk sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah :

1. Penguatan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Kependudukdan dan Keluarga Berencana (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan deng permasalahan antara lain :

   a. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak.

   b. Pelaksanaan advokasi KIE belum eekti, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98 % dari pasangan uia subur/PUS), namun tidak perilaku untuk menjadi peserta KB 58,7 % (SDKI 2012). Disamping itu masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan, hanya 34,2 % (data BKKBN

   c. Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah pedesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidi pengeluaran keluarga.

   d. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsi gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan.

   e. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum terpahami secara optimal.

   f. Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB antara lain :

   a. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern peningkatannya kurang signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 % pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 % pada tahun 2007 da 2012 peningkatannya menjadi sebesar 57,9 %.

   b. Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 % atau 11,4 % apabila dengan menggunakan metode formulasi baru.

   c. Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar provinsi, kabupaten/kota atau antar wilayah, maupun antar wilayah, tingkat pendidikan dan antar tingkat pengeluaran keluarga.

   d. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi yaitu 27,1 %.

   e. Penggunaan alat obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus menigkat dari 46,5 % menjadi 47,3 % (SDKI 2007 dan 2012), sementara Metode Kontra panjang (MKJP) cenderung menurun, 10,9 % menjadi 10,6 % (atau 18,3 % dengan pembagi CPR modern.

   f. Rendahnya kesertaan KB pria yaitu sebesar 2,0 % (SDKI 2007 dan 2012).

   g. Kualitas pelayanan KB (Supply Side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan ketersediaan dan pesebaran fasilitas kesehatan yang kompeten termasuk mengenai efek samp penggungaannya, serta komplikasi dan kegagalan.

   h. Masih terdapat permasalahan yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alkon di fasilitas kesehatan (faskes) / klinik pelayanan KB (Supply Chains).

   i. Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan

3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah menurunkan resiko kematian ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja antara lain :

   a. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15 - 19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun (SDKI 2012) dan remaja usia 15 - 19 tahun yang menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 % menjadi sebesar 9,5 % (SDKI 2012).

   b. Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usua kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehat adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria).

c. Terdapat kesenjangan dalam pembianaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kemat kelompok usia 15 - 19 tahun).

d. Tingginya perilaku seks pra nikah disebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi.

e. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.

f. Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

4. Pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangk pembinaan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

a. Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 % dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera /KPS sebanyak 20,3 % dan Keluarga S 1 sebesar 23,1 % (Pendataan Keluarga, BKKBN 2015).

b. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah.

c. Partisipasi pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih renda

d. Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal.

e. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

f. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaa

g. Kelompok kegiatan/Poktan, ang tersiri dari : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapa Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber KB/pelestarian peserta KB Aktif (KA).

h. Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

5. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dar kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan, antara lain :

a. Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa pereaturan pemerintah dari UU nomor 52 tah belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB.

b. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidan KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan d program KKBPK dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukan dalam perencanaan daerah, se perundang-undangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB.

c. Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain: koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Prog Harapan/PKH, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial.

6. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS diantaranya administrasi yang menc kependudukan dan KB serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi pembangunan kependudukan dan KB. Data sektor peranan penting dalam menyusun rencana pelaksanaan rencana pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

CAPAIAN PROGRAM	1.	Tolak Ukur Meningkatnya pemahaman pria tentang program KKBPK sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan persentase partisipasi pria dalam keikutsertaan b ditingkatkan dari 2 % menjadi 30 %. Indikator dan target Kinerja Input : a. Panduan yang responsif gender. b. Keikutsertaan pria dalam kegiatan ini. c. Dana. Output : Meningkatnya partisipasi pria dalam keikutsertaan ber KB. (Pria sebesar 30 % dan Perempuan 70 %). Outcomes : Meningkatnya SDM baik pria maupun perempuan terhadap keberhasilan program KKBPK.	
JUMLAH ANGGARAN/KEGIATAN		Rp. 332.298.400,-	
RENCANA AKSI		Kegiatan 1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi rutin
		Kegiatan 2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi PKK KB Kes
		Kegiatan 3	Pelayanan pemasangan kontrasepsi TNI KB Kes
		Kegiatan 4	Pelayanan pemasangan kontrasepsi IBI KB Kes
		Kegiatan 5	Pelayanan pemasangan kontrasepsi Bhayangkara KB Kes
		Output : a. Meningkatnya peran serta laki-laki dalam pelaksanaan kegiatan yaitu 30 % pria dan 70 % perempuan. b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK.	

DAMPAK/HASIL/MANFAAT		Meningkatnya SDM baik laki-laki maupun perempuan terhadap program KKBPK di Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, Juli 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA,

DESRIZAL, SKM. M.Kes
NIP. 19630219 198610 1 001